



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

SUBSIDI YANG MENJEBAK

Juli Panglima Saragih

Peneliti Madya

juli.saragih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Ketika ekonomi masyarakat belum berkembang dan meningkat, ditambah lagi diterpa pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 maka subsidi dari negara sangat bermanfaat. Selama bertahun-tahun subsidi dialokasikan pemerintah dalam APBN yang mencapai ratusan triliun rupiah, khususnya untuk subsidi energi. Kini BBM jenis Pertalite, Biosolar, LPG 3 Kg, dan listrik 450 VA yang masih disubsidi pemerintah dalam APBN Tahun Anggaran 2022. Selain subsidi energi, pemerintah juga memberikan subsidi pupuk kepada petani sehingga harga pupuk dapat dijangkau/dibeli oleh para petani. Tujuan subsidi adalah menjaga daya beli masyarakat tertentu. Jika subsidi dikurangi atau dihapus maka akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, termasuk harga beras jika subsidi pupuk dihilangkan. Sedangkan jika subsidi dipertahankan maka beban anggaran negara semakin bertambah.

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok dapat menaikkan inflasi. Saat ini inflasi sudah mencapai rata-rata sebesar 3,5% sejak bulan Ramadhan sampai Mei 2022, karena sebagian harga barang kebutuhan pokok masyarakat sudah naik, seperti minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan lain-lain. Cara yang paling mudah untuk mengurangi beban subsidi adalah menaikkan harga BBM, LPG 3 Kg, dan menghapus subsidi listrik. Tetapi dampaknya adalah harga barang-barang akan naik dan memicu inflasi. Jika inflasi tinggi maka akan mempersulit pertumbuhan ekonomi, karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi (PDB) ditopang oleh sektor konsumsi (daya beli) masyarakat. Inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli masyarakat.

Pemerintah sudah menaikkan BBM Pertamina, namun harga Pertalite (Rp7.650) dan Biosolar (Rp5.500) belum naik. Sementara harga minyak mentah di pasar global sudah di atas USD100 per barel. Padahal, harga patokan minyak mentah Indonesia dalam APBN Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar USD63 per barel. Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah mampu menahan kenaikan beban subsidi dalam anggaran negara? Beban subsidi dan kompensasi meningkat mencapai Rp349,9 triliun dalam menahan gejolak harga komoditas tahun 2022. Lebih lanjut, Menteri Keuangan menjelaskan jika menggunakan asumsi ICP USD100 per barel maka subsidi energi melonjak dari semula Rp134 triliun menjadi Rp208,9 triliun. Sementara, pembayaran kompensasi juga mengalami peningkatan akibat meningkatnya potensi kewajiban pembayaran kompensasi pada tahun 2022. Pembayaran kompensasi tahun 2022 meningkat dari semula Rp18,5 triliun menjadi Rp293,5 triliun, yang terdiri atas kompensasi BBM Rp252,5 triliun dan kompensasi listrik Rp41 triliun.

Harga keekonomian dari BBM kita mengalami perubahan sangat tinggi. Harga keekonomian sudah jauh di atas harga minyak asumsi APBN atau harga yang digunakan untuk mengalokasikan subsidi APBN untuk minyak tanah, Biosolar, LPG 3 Kg, dan Pertalite. Dengan gap atau selisih yang semakin besar antara harga jual eceran BBM dan harga keekonomian,

pemerintah berkomitmen untuk menjaga pasokan serta harga BBM dan LPG 3 Kg yang terjangkau masyarakat. Pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian pagu subsidi dan kompensasi sehingga keuangan badan usaha menjadi sehat dan dapat menjaga ketersediaan energi nasional. Subsidi apapun itu dapat menjebak pemerintah jika terus-menerus tidak dilakukan pengkajian atau diturunkan besarnya dalam anggaran negara. Jebakan subsidi justru menjadi bumerang bagi negara dan berimplikasi terhadap kebutuhan anggaran belanja untuk hal-hal yang sifatnya produktif atau pembangunan berbagai infrastruktur di tanah air.

Atensi DPR

Subsidi sudah membebani anggaran negara setiap tahunnya sehingga penting bagi DPR RI untuk mengkaji dan mengevaluasi kembali kebijakan tentang subsidi di sektor energi dalam APBN. Subsidi ini sangat penting dalam menjaga tingkat daya beli masyarakat agar perekonomian dapat berjalan. Menjadi dilema bagi DPR RI sampai saat ini apakah mempertahankan subsidi di sektor energi dalam APBN untuk menjaga daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi, atau menghapusnya di masa mendatang dengan risiko naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Bagaimana sebaiknya pengelolaan subsidi dalam anggaran negara agar tidak terlalu membebani keuangan negara, dan mekanisme distribusinya juga perlu diawasi dan dievaluasi. Eksekusi pendistribusian subsidi dari APBN menjadi kewenangan pemerintah. Terkait permasalahan tersebut, DPR RI khususnya Komisi VII dapat mengkaji dan mengevaluasi kembali subsidi di sektor energi agar tidak membebani keuangan negara.

Sumber

kemenkeu.go.id, 6 Juni 2022; dan
Media Indonesia, 4 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Eka Budiyanti
Nidya Waras Sayekti
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022